



Politik Bahasa “Jawa Anyar” Dalam Ranah Pendidikan

Restu Rahmawati

Program Studi Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Jl Sunter Permai Raya Sunter Podomoro Jakarta Utara

restu.rahmawati3@gmail.com

Abstract

His study examines about Political language of Jawa Anyar in education on the local content curriculum in Banyumas. The purpose of this study was to clarify the chronological occurrence of the Political language of Jawa Anyar on the local content curriculum in Banyumas, and to evaluate the response of Banyumas community associated with the implementation of the political language. The method used in this study is qualitative descriptive analysis. The study results that first, the political language caused by construction and reconstruction of the Political language of Jawa Anyar. The political manifestation of the Political language of Jawa Anyar is due to policy of local local content curriculum at all levels of public education in Banyumas regency. Secondly, the political response of Banyumas community to the Political language of Jawa Anyar is through resistance action as practiced by the school parties, e.g., principal, teachers, students, and cultural community of Banyumas. Third, as a theoretical reflection on the field findings, the author argues that political language is actually the only kind of reduction in the participation of minority language groups. Therefore, the planning effort of Political language of Jawa Anyar as the interest of state apparatus has reduced the participation of minority language groups; in this case, it reduces participation of Banyumas language community.

Key words: Political Language, Response, Resistance

Abstrak

Penelitian ini pada dasarnya mengkaji tentang Politik Bahasa “Jawa Anyar” dalam ranah pendidikan yang tertuang dalam kurikulum muatan lokal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan terjadinya politik bahasa Jawa Anyar dalam kurikulum muatan lokal di Banyumas, dan untuk mengetahui respon serta bentuk respon masyarakat Banyumas terkait dengan adanya penerapan muatan lokal bahasa “Jawa Anyar” di Banyumas. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas dengan metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, politik bahasa Jawa Anyar lahir karena adanya konstruksi dan rekonstruksi terhadap bahasa Jawa Anyar. Kedua, masyarakat Banyumas merespon politik bahasa Jawa Anyar dengan cara melakukan resistensi seperti yang dilakukan oleh

kepala sekolah, guru, siswa, dan budayawan Banyumas. Ketiga, sebagai refleksi teoritis atas hasil temuan dilapangan, maka penulis berargumen bahwa politik bahasa itu sebenarnya adalah pengurangan partisipasi kelompok bahasa minoritas. Oleh karena itu, adanya upaya perencanaan Bahasa Jawa Anyar demi kepentingan aparatus negara telah mengurangi partisipasi kelompok bahasa minoritas dalam hal ini mengurangi partisipasi Bahasa Banyumasan.

Kata kunci: Politik Bahasa, Respon, Resistensi

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas tentang politik Bahasa Jawa Anyar dalam ranah pendidikan yang tertuang dalam kurikulum muatan lokal di Banyumas. Adapun penelitian ini dilakukan yakni berawal dari adanya kegelisahan penulis terhadap putusan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 895.5/01/2005, dinyatakan bahwa kurikulum mata pelajaran bahasa Jawa wajib dilaksanakan di semua jenjang sekolah di Provinsi Jawa Tengah mulai tahun ajaran 2005/2006 untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan SMA/ SMK/MA/SMALB baik sekolah negeri maupun swasta. Keputusan ini menunjukkan bahwa Bahasa Jawa Anyar merupakan bahasa yang harus diajarkan di berbagai jenjang pendidikan di Jawa Tengah. Ditetapkannya bahasa Jawa Anyar sebagai pelajaran muatan lokal di Propinsi Jawa Tengah, berawal dari adanya pengakuan bersama yang menegaskan bahwa Bahasa Jawa Anyar (bahasa Yogyakarta dan Solo) merupakan bahasa yang dianggap paling baku dan adiluhung. Oleh karena itu, adanya penentuan bahasa Jawa Anyar sebagai bahasa lokal yang harus diajarkan kepada seluruh siswa di seluruh daerah di Jawa Tengah, tentu saja dalam jangka panjang dapat berimplikasi menimbulkan keterasingan terhadap bahasa ibu, dan tradisi lokal individu atau kelompok tertentu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Frantz Fanon yang menjelaskan bahwa semakin seseorang berbicara dan menjagokan bahasa “tertentu”, maka dalam jangka waktu panjang orang itu akan semakin lupa dengan bahasa ibunya, kebudayaannya dan peradabannya. Proses ini menurut Fanon merupakan semacam *amnesia* budaya. (Johnson, 2001, h. xxvi)

Pengakuan bersama mengenai penegasan bahasa Jawa Anyar sebagai bahasa baku tersebut, telah menyebabkan terjadinya sentralisasi bahasa Jawa Anyar. Hal inilah kemudian yang telah mendorong terjadinya politik bahasa atau suatu perencanaan perubahan bahasa yang disengaja untuk tujuan-tujuan tertentu hingga menimbulkan satu sistem bahasa baru. (Handayani, 2002, h. 2) Dengan kata lain, terjadinya sentralitas bahasa Jawa Anyar tersebut menunjukkan identitas budaya lokal atau daerah yang menerangkan suatu kelompok etnik tertentu.

Lebih jauh penulis melihat bahwa kekuatan yang dimiliki bahasa Jawa Anyar, telah menjadikannya bersifat dominan, berasosiasi dengan negara sehingga pada akhirnya bahasa Jawa Anyar tersebut menjadi bahasa lokal wajib yang harus diajarkan di berbagai jenjang pendidikan di Jawa Tengah. Hal ini kemudian, yang

penulis lihat sebagai bentuk politik bahasa Jawa Anyar yang masuk dalam ranah pendidikan. Kecenderungan bahasa Jawa Anyar berasosiasi dengan negara, sehingga menimbulkan satu sistem bahasa baru yang harus diakui dan dipatuhi, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan resiko kerugian bagi bahasa Jawa lainnya yang didominasi. Padahal, bahasa daerah merupakan bahasa perhubungan atau sarana komunikasi intramasyarakat dan dipakai sebagai sarana pendukung budaya daerah atau masyarakat etnik di wilayah Republik Indonesia, sekaligus sebagai bahasa ibu. (Alwi dan Dendy, 2003, h. 4) Oleh karena itu, kompetisi antara satu bahasa dengan bahasa lainnya tersebut dapat memicu ketegangan yang pada akhirnya berimplikasi timbulnya kompetisi politik dengan menggunakan simbol-simbol bahasa (Laitin, dkk, 1994 dikutip dalam Schmidt, 2000:4-12).

Masuknya politik bahasa Jawa Anyar dalam ranah pendidikan terutama yang termanifestasikan dalam kurikulum muatan lokal, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan respon bahkan resistensi dari masyarakat Jawa lainnya yang merasa dirugikan dengan adanya politik bahasa Jawa Anyar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa dan keberagamannya juga dapat menjadi sumber masalah apabila kesadaran tentangnya menonjolkan rasa superioritas dan hegemoni bahasa yang satu terhadap bahasa yang lainnya. Sebagai masalah, bahasa terkadang dipandang sebagai ancaman bagi *nation-state formation* (*nation-building*) yang damai dan berhasil. (Scionti, 2001, h. 20) Dengan demikian, keberagaman etnolinguistik, bahkan bisa dilihat sebagai kutukan, yakni sesuatu yang harus dihindari, dan menakutkan.

Secara konseptual, kurikulum muatan lokal (Mulok) memang bagus, karena menurut para perancangannya, adanya kurikulum muatan lokal dimaksudkan untuk mengakomodasi potensi-potensi lokal yang ada di sekitar sekolah guna menghindarkan terjadinya murid tercerabut dari akar-akar lingkungan geografis, ekonomis, sosial, dan budaya. Namun, dalam prakteknya di lapangan, kurikulum muatan lokal terkadang masih tersentral di tingkat propinsi.

Artinya, pelajaran muatan lokal di sekolah satu dan lainnya dalam satu propinsi itu sama, yang membedakan hanya propinsi satu dengan propinsi lain. Begitu pun yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah, dimana muatan lokalnya masih tersentral di Propinsi. Contohnya saja adanya mata pelajaran muatan lokal wajib yakni pelajaran bahasa Jawa Anyar yang harus diajarkan di seluruh jenjang pendidikan di Banyumas. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa telah terjadi politik bahasa disini. Idealnya setelah wacana desentralisasi bergulir, setiap daerah diberi wewenang untuk mengembangkan bahasa daerahnya masing-masing. Hal ini dikarenakan, setiap daerah mempunyai keunikan dan kekhasan tersendiri sehingga harus diberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan bahasa daerahnya masing-masing supaya tidak berimplikasi terhadap matinya sebuah identitas bahasa dari suatu komunitas.

Begitu pula halnya yang terjadi dengan Bahasa Banyumasan, yakni salah satu jenis dialek Bahasa Jawa, sekaligus sebagai penanda identitas masyarakat Banyumas dan sekitarnya, saat ini keberadaannya menjadi terancam akibat masuknya bahasa Jawa Anyar dalam ranah pendidikan. Kekhasan dan keunikan Bahasa Banyumasan, tidak dijadikan modal dasar bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan bahasa tersebut menjadi bahasa yang diajarkan dalam kurikulum muatan lokal di setiap jenjang pendidikan di Banyumas. Oleh karena itu, tidak adanya kepekaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah terhadap pentingnya pengembangan bahasa daerah tersebut, maka telah mendorong masyarakat Banyumas jeli mencari celah-celah yang memungkinkan mereka untuk melakukan respon bahkan resistensi terhadap politik Bahasa Jawa Anyar tersebut.

Terkait dengan hal itu, maka ketika berbicara studi politik bahasa tentu saja telah mengalami perkembangan dan pasang surut. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang mendapat aksentuasi yang lebih jelas dan mulai terarah pada masa perjuangan sumpah pemuda 1928, lebih menyoroti studi politik bahasa nasional. Studi ini pernah ditulis oleh Sebastianus Fernandez dengan judul *Politik Bahasa Nasional dan Bahasa Daerah: Multikulturalisme, Pembangunan dan Perspektif Negara Bangsa*. Studi ini berhasil memberikan gambaran tentang keberhasilan bahasa Indonesia yang mampu menyatukan berbagai masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, dan sekaligus sebagai lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia, alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda (Halim, 1984 h. 15-21). Inilah kemudian yang disebutnya sebagai politik bahasa nasional. Dengan demikian, intinya Fernandez ingin menegaskan bahwa multikulturalisme dalam politik bahasa nasional, menyangkut identitas atau jati diri bangsa yang multi/ polietnik. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Bahasa Indonesia jangan sampai hanya dijadikan slogan politik semata, tanpa usaha nyata untuk memeliharanya.

Beranjak dari penjelasan di atas, maka seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan kajian politik bahasa, maka kajian politik bahasa mengalami perkembangan yakni tidak lagi terfokus pada kajian politik bahasa nasional, namun sudah lebih spesifik yakni mengkaji politik bahasa daerah. Hal ini pernah dilakukan oleh A. Chaedar Alwasilah yang mengkaji politik bahasa Sunda dengan judul penelitiannya *Meluruskan Politik Bahasa Ibu*. Studi ini berhasil memberikan gambaran tentang bagaimana mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa daerah agar semakin baik di masa yang akan datang. Berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah baik itu Perda atau lainnya terkait pelaksanaan politik bahasa, dimaksudkan guna memberikan arahan dan membakukan bahasa Sunda itu sendiri.

Adapun langkah politik bahasa Sunda yang digambarkan dalam studinya Alwasilah yakni melalui petunjuk teknis mengenai pembakuan bahasa Sunda sehingga semua pihak dari pejabat Pemda sampai guru dan penyuluh bahasa,

kesenian, dan kepublikan mengetahui langkah-langkah operasionalnya. Melakukan sosialisasi perda ke berbagai instansi seperti DPRD tingkat II, universitas khususnya fakultas sastra, sanggar-sanggar sastra, penerbit-penerbit, media massa, berbagai dinas terkait, kelompok profesi, dan sebagainya.

Sosialisasi ini penting untuk mendapat masukan operasional dari lapangan. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perda untuk disebarluaskan kepada semua instansi terkait, dan melakukan evaluasi berkala pelaksanaan perda di atas. Evaluasi ini dimaksudkan guna melihat sejauhmana Perda itu dilaksanakan. Dengan demikian, politik bahasa Sunda dalam Perda No. 5 Tahun 2003 dimaksudkan tidak hanya sekedar pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah, namun yang lebih penting adalah penumbuhan rasa bangga terhadapnya.

Namun apa yang luput dari kajian Sebastianus Fernandez dan A. Chaedar Alwasilah dan studi-studi politik bahasa lainnya adalah mengenai permasalahan yang diakibatkan dari adanya politik bahasa terhadap masyarakat yang terkena dampak. Oleh karena itu, kebanyakan studi politik bahasa belum menyentuh pada ranah kajian tentang respon masyarakat terhadap pengaruh politik bahasa. Padahal menurut penulis, perlu ada studi tentang hal tersebut guna mengetahui seperti apa sikap dan tindakan masyarakat terkait penerapan politik bahasa daerah tertentu. Jangan-jangan, sebenarnya penuh dengan gejala bahkan konflik dimasyarakat sebagai bentuk respon mereka terhadap adanya politik bahasa daerah, apalagi jika politik bahasa daerah tersebut masuk dalam ranah institusi pendidikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka salah satu sisi penting penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana politik Bahasa Jawa Anyar dalam kurikulum muatan lokal di Banyumas, ingin mengetahui respon masyarakat Banyumas terkait adanya politik bahasa Jawa Anyar, serta ingin mengetahui bentuk respon yang dilakukan masyarakat Banyumas terkait dengan adanya penerapan muatan lokal Bahasa Jawa Anyar di Banyumas. Disisi lain, studi ini mengandung signifikansi mencari basis empiris bagaimana menciptakan *nation building* yang damai dan harmonis dengan basis menciptakan keadilan di masyarakat. Sebagai tambahan, studi ini diharapkan mampu menjelaskan format politik bahasa daerah seperti apa yang dapat mengcover identitas lokal masing-masing daerah.

Politik Bahasa

Terkait teori politik bahasa, penulis mengacu kepada pendapatnya A. Chaedar Alwasilah, Sebastianus Fernandez, dan Amran Halim. Ketiga orang tersebut, masing-masing menyajikan konsep politik bahasa dari sudut yang berbeda-beda. Akan tetapi guna kepentingan penelitian ini, dari ketiga konsep politik bahasa tersebut penulis mengambil konsep politik bahasa yang dikemukakan oleh A. Chaedar Alwasilah dan Sebastianus Fernandez.

Menurut pandangan Sebastianus Fernandez, alasan ia mengkorelasikan konsep politik bahasa dengan multikulturalisme adalah karena menurutnya multikulturalisme baik dalam tataran demografis maupun deskriptif, ideologis maupun politis itu dipengaruhi oleh bahasa. Bahasa dengan keberagamannya

mempunyai kuasa atau kekuatan untuk membentuk dan mengukuhkan kesadaran orang tentang perbedaan dan kemiripan yang ada diantaranya sekaligus membimbing seseorang untuk mendapatkan persepsi tentang dirinya dan orang lain.

Berdasarkan konsep politik bahasa sebagaimana dipahami di atas, maka Fernandez juga menjelaskan tentang orientasi adanya perencanaan bahasa. Terkait dengan perencanaan bahasa tersebut, maka ia menjelaskan bahwa terjadinya politik bahasa bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan, diantaranya yakni adanya kepentingan bahwa bahasa merupakan hak, bahasa sebagai sumber daya, bahasa sebagai masalah, bahasa sebagai alat, dan bahasa sebagai ideologi yang beragam. Dengan beragamnya kepentingan terhadap bahasa tersebut, maka Fernandez menjelaskan beberapa contoh terjadinya politik bahasa diberbagai negara beserta kepentingannya.

Fernandez menegaskan bahwa politik bahasa dapat mengurangi keragaman bahasa melalui kebijakan-kebijakan resmi rasionalisasi. (Fanon, Frantz. 2000. h. 56) Kebijakan politik bahasa seperti itu dapat mengancam kelangsungan hidup kelompok-kelompok bahasa yang kecil, yang mana mungkin meletakkan tuntutan mereka kepada pemerintah untuk menegakkan kebijakan-kebijakan yang dapat memperbaiki kesempatan-kesempatannya untuk bertahan hidup. Dengan memarginalkan lembaga-lembaga yang paralel itu, model ini berusaha membatasi partisipasi orang-orang dari kelompok bahasa minoritas itu di dalam lembaga-lembaga mainstream yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir model multikultural atau pluralis. Model ini mencari partisipasi yang nyata/ diakui dari bahasa-bahasa minoritas dalam bidang publik. Intinya model pluralis ini memberikan kebebasan kepada bahasa-bahasa minoritas untuk berkembang, tanpa ada tekanan dari kelompok bahasa mayoritas/kelompok bahasa yang mendominasi.

Berdasarkan ketiga tipe ideal politik bahasa yang telah dijelaskan di atas, lebih jauh Fernandez menjelaskan bahwa dalam dinamika konflik bahasa dalam konteks negara bangsa modern saat ini, negara bangsa cenderung telah terjalin dengan idaman monolingualisme. Kebijakan ini berusaha memenuhi persyaratan industrialisasi dan birokratisasi. Jadi disini promosi satu bahasa merupakan fungsi simbolik bahasa sebagai model warga dan etnik negara bangsa. Dinamika negara bangsa modern dan idaman monolingual ini menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok bahasa yang tidak dominan. Pemerintah dalam hal ini secara khas telah merespon keberadaan minoritas-minoritas bahasa dalam teritorialnya dengan kebijakan bahasa yang melenyapkannya, dan menjadikannya bahasa pinggiran. Demikianlah inti dari tulisannya Fernandez tentang politik bahasa, yang apabila disimpulkan maka ia ingin menjelaskan bahwa multikulturalisme dalam politik bahasa nasional dan daerah karena menyangkut identitas atau jati diri bangsa yang multikultur jangan hanya dijadikan slogan politik yang kosong.

Beranjak dari tulisannya Fernandez, maka berikutnya penulis akan menjelaskan konsep politik bahasa menurut A. Chaedar Alwasilah. Tulisan Alwasilah lebih banyak menyoroti bagaimana politik bahasa itu berkorelasi dengan pendidikan bahasa dan pembangunan. Tentu saja ini sedikit berbeda dengan kajian Fernandez yang telah dibahas sebelumnya. Pembahasan Alwasilah tentang politik bahasa, dimulai dengan penjelasannya tentang individu yang memiliki fitrah bahasa sangat mendambakan kebebasan individu, golongan, kelompok, dan suku bangsa nusantara untuk berbahasa (daerah, nasional, asing). Berdasarkan hal tersebut, maka politik bahasa menurut Alwasilah dipahami sebagai perwujudan tanggungjawab dalam berbahasa sebagai alat untuk mengejar kepentingan masing-masing. Atau dengan kata lain, dalam politik bahasa tersebut terjadi suatu perencanaan bahasa yang disengaja untuk tujuan-tujuan tertentu sampai dengan penciptaan satu sistem bahasa baru. (Alwasilah, Chaedar. 1997. h. 89)

Hakekat politik bahasa berikutnya yakni menurut Hamran Halim. Menurut Hamran Halim, suatu politik bahasa itu perlu dibakukan dalam suatu kebijakan kebahasaan guna menentukan fungsi dan kedudukan bahasa itu sendiri. Adapun fungsi bahasa yang dimaksud disini adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu di dalam kedudukan yang diberikan. Sedangkan yang dimaksud kedudukan bahasa adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya, yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa intinya politik bahasa menurut Hamran adalah ditujukan guna kepentingan penentuan fungsi dan kedudukan dari bahasa itu sendiri. (Halim, Halim dkk. 1983. h. 71)

Teori Respon

Setelah menjelaskan teori politik bahasa, maka selanjutnya penulis akan memaparkan tentang teori respon. Teori ini digunakan untuk melihat makna respon masyarakat Banyumas terkait adanya politik bahasa. Buku tentang respon yang penulis gunakan yakni buku yang ditulis oleh Azwar (2007). Menurutnya, makna respon yakni jawaban atas reaksi yang diberikan individu terhadap stimulus (rangsangan) lingkungan sosial yang diterimanya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa respon adalah sikap evaluatif atau reaksi perasaan terhadap suatu objek sikap.

Selain itu, Sarwono dan Wirawan (Ritohardoyo, Su. 2003. h. 15) menjelaskan bahwa respon adalah sikap manusia yang menempatkan objek yang dipikirkan ke dalam suatu dimensi pertimbangan. Hal inilah kemudian yang ingin penulis lihat dari masyarakat Banyumas, yakni bagaimana sikap mereka terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud dalam hal ini yakni pelaksanaan politik bahasa dalam kurikulum muatan lokal.

Masih dalam buku yang sama, Pierre (Ritohardoyo, Su. 2003. h. 25) menjelaskan bahwa ada tiga tahapan respon yang muncul dalam mengetahui sikap

masyarakat yakni *pertama*, respon kognitif (respon perseptual dan pernyataan mengenai apa yang diyakini) merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu si pemilik sikap. *Kedua*, respon afektif (respon respon syaraf simpatetik dan munculnya pernyataan afeksi) yang merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. *Ketiga*, respon perilaku/ konatif (respon berupa tindakan dan pernyataan mengenai perilaku) sebagai perasaan yang menyangkut aspek emosional. Pada dasarnya, tanggapan (respon) seseorang atau kelompok masyarakat terhadap suatu program diawali oleh tindakan pengambilan keputusan (Ritohardoyo, 2003, h. 28) mengartikan bahwa pengambilan keputusan sebagai pemilihan antara berbagai alternatif, yang dalam prosesnya mencakup tiga tahap yakni 1) Menemukan lingkungan dimana permasalahan itu timbul; 2) Menemukan dan menganalisis berbagai alternatif; dan 3) Melakukan pilihan diantara berbagai alternatif yang tersedia.

Setelah mengetahui bagaimana tahapan suatu respon, maka hal berikutnya yang harus diketahui yakni implementasi suatu respon. Mengapa demikian? Karena guna melihat respon yang diberikan seseorang terhadap suatu objek, maka hanya dapat dilihat dari perwujudan respon itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut, penulis akan menjelaskan tentang konsep implementasi respon. Implementasi respon (Ritohardoyo, 2003, h. 30) (mencakup tiga perwujudan yakni 1) tindakan penilaian (dalam benak atau otak seseorang) terhadap baik buruknya objek berdasar faktor keuntungan atau kerugian yang akan diterima dari objek tersebut (persepsi); 2) sikap lahir yang dapat terucap secara lisan (pendapat) mau menerima atau menolak obyek yang dipersepsikan; dan 3) tindakan melakukan kegiatan lahir untuk berperanserta atau melaksanakan suatu kegiatan terkait objek tersebut.

Teori Resistensi

Penelitian ini pada dasarnya membicarakan persoalan bahasa yang berkuasa dan dikuasai. Berdasarkan persoalan tersebut, maka penulis teringat akan perkataannya Bennett yang menyebutkan bahwa budaya dominan yang memaksakan kebudayaannya dengan semena-mena terhadap kebudayaan lainnya, maka akan memicu timbulnya resistensi yang terletak di luar kebudayaan yang mendominasi. (Bennett, 1998: 171).

Pernyataan Bennett di atas, apabila dikontekskan dengan penelitian ini, sudah cukup mewakili. Artinya bahwa dimensi-dimensi perlawanan yang dikemukakan Bennett, mewakili konsep perlawanan yang menjadi *concern* penelitian ini. Dimana Bennett menjelaskan bahwa suatu perlawanan yang disebabkan oleh adanya relasi kuasa antara kebudayaan dominan terhadap kebudayaan subordinat, maka akan memicu timbulnya resistensi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap budaya dominan tersebut. Namun disudut lainnya resistensi mengandung makna sebuah perlawanan atau strategi untuk mengukuhkan eksistensi seseorang atau suatu komunitas (Arman, 2003, h. 69).

Bahkan menurut Nugroho, resistensi itu adalah tindakan individu atau kelompok dalam upaya melakukan perlawanan terhadap kebijakan publik. (Nugroho, 2003, h. 25) Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa resistensi adalah suatu perlawanan sebagai reaksi terhadap kebijakan publik yang dianggap mengancam eksistensi individu atau kelompok. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa resistensi itu merupakan respon dari adanya rangsangan yang berada di luar individu atau kelompok.

Semakin dianggap nyata dan besar ancaman tersebut, maka semakin keras perlawanan yang akan diberikan, bahkan dapat memicu timbulnya *civil disobedience* yakni masyarakat melawan segala tindakan yang dibuat oleh pejabat publik dan untuk mengubah kebijakan publik itu ke arah lebih baik dan lebih adil dengan tindakan anti kekerasan. *Civil disobedience* muncul dalam bentuk tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh produk perundang-undangan karena menyadari produk perundang-undangan tersebut berlawanan dengan moral. (Nugroho, 2003, h. 25) Setelah menyimak penjelasan di atas mengenai apa itu resistensi, maka dapat dijelaskan bahwa bentuk-bentuk resistensi meliputi perlawanan dengan senjata, pidato yang menghasut, pidato yang menimbulkan kisruh dan rasial, bahkan meliputi budaya dan politik balas dendam yakni sebuah perlawanan yang selalu muncul akibat perang. (Aschroft, 2001, h. 19).

Subyek tersebut dapat mengetahui pengalaman menguasai, bahkan waktu akan terkena sanksi disiplin atau penertiban yang mengklaim persoalannya. Foucault menyamakan ini dengan seni bela diri judo, yang menyarankan bahwa kadang-kadang jawaban yang terbaik dari manuver lawan adalah untuk tidak mundur tetapi menurut gerak lawan, kemudian membelokkan kepentingannya sebagai tempat istirahat untuk sementara bagi fase berikutnya. (Faith dalam Storey, 1998, h. 165)

Dalam hubungan dengan perlawanan terhadap masyarakat terjajah, resistensi berperan ibarat sebagai pasukan/tentara tempur, yakni perjuangan membebaskan sebuah bangsa. Aschroft menyampaikan bahwa perlawanan seperti itu dapat dikatakan bersifat radikal. Resistensi radikal merupakan perlawanan masyarakat terjajah terhadap kekuasaan kolonial. Dimana resistensi radikal dicirikan oleh adanya rencana-rencana pergerakan yang terorganisasi, yang dilakukan dengan menyerang secara langsung melalui peperangan atau dengan memproduksi teks atau bacaan. (Lo and Gilbert, 1998, h. 25 dalam Susanto Budi, 2008) Selain bersifat radikal, Aschroft (2001, h. 20) menjelaskan bahwa resistensi juga bersifat pasif. Resistensi pasif adalah resistensi sebagai perwujudan dirinya untuk menolak. Resistensi pasif ini ditujukan guna mempertahankan sebuah identitas dan kepemilikan budaya.

Kemudian di kutub resistensi lain, belakangan ini muncul bentuk resistensi yang berbentuk reaktif. Bentuk perlawanan ini muncul karena kenyataan makin dominannya modernisasi dan penetrasi negara. Desakan perubahan yang dahsyat pada tingkat tertentu mendorong mereka untuk menarik diri lebih jauh dari

interaksi sosial. (Budiman 2005, h. 105) Selain bentuk resistensi yang disebutkan di atas, maka bentuk resistensi lainnya yakni resistensi tertutup (simbolis/ideologi) seperti penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa. Menurut Scott, bentuk resistensi ini muncul tidak berpretensi mengubah sistem dominasi, tetapi hanya untuk menolak sistem yang berlaku yang bersifat eksploitatif dan tidak adil. (Scott, James. 1993. h. 302)

Berikutnya yakni resistensi semi-terbuka seperti protes sosial dan demonstrasi mengajukan klaim kepada pihak yang berwenang. Scott mengatakan bahwa bentuk resistensi ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dapat menimpa dirinya. (Scott, James. 1993. h. 303) Resistensi yang selanjutnya yakni resistensi terbuka atau resistensi yang terorganisasi, sistematis, dan berprinsip. Menurut Scott, resistensi terbuka ini mempunyai dampak-dampak yang revolusioner. Tujuannya adalah berusaha meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. Manifestasi dari bentuk resistensi ini adalah digunakannya cara-cara kekerasan seperti pemberontakan. (Scott, James. 1993. h. 306)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Studi Kasus (case study)*. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah sekolah-sekolah di Kabupaten Banyumas yang meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Akan Tetapi, dari seluruh jumlah SMA (103 sekolah), SMP (209 sekolah) dan SD (171 sekolah) hanya diambil 4 sekolah dari setiap jenjang pendidikan tersebut yakni sekitar 12 sekolah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Kemudian untuk teknik analisis data, data dianalisis dengan menggunakan empat tahap yakni *pertama*, tahap pemilahan (*sortiring*) data yang terkait dengan resistensi kelompok pendidik. *Kedua*, tahap klasifikasi (*categorizing*) dengan melakukan perbandingan antara data yang satu dengan yang lain. *Ketiga*, tahap komparasi yakni dengan melakukan perbandingan antara data yang satu dengan yang lain. Dan *keempat* tahap sintesis (*synthesizing*) dengan melakukan penafsiran terhadap data resistensi dan mengaitkannya dengan kerangka teori sehingga dapat dipahami fenomena resistensi tersebut (Newman, W. Laurence, 1997, h. 427)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Bahasa Jawa Anyar dalam Kurikulum Muatan Lokal

Perspektif konstruktivisme memandang bahwa bahasa Jawa Anyar merupakan sesuatu yang dibentuk dan merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks. Hal ini menegaskan bahwa konstruksi bahasa Jawa Anyar terbentuk atas dasar kategori sosial dan merupakan hasil dari kesadaran kultural. Berdasarkan penjelasan tersebut maka bahasa Jawa Anyar sebagai konstruksi

budaya selalu diidentikkan dengan kata adiluhung, dinilai kaya filsafat luhur dan ajaran spiritual yang agung. Konstruksi-konstruksi yang terbangun atas bahasa Jawa Anyar tersebut apabila terus dipelihara dan mengakar kuat dalam masyarakat maka cenderung akan menyebabkan terjadinya politik bahasa Anyar yakni suatu perencanaan bahasa Jawa Anyar yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu sampai dengan penciptaan satu sistem bahasa baru. Terciptanya satu sistem bahasa baru tersebut merupakan akibat dari proses konstruksi yang terus dilakukan terhadap bahasa Jawa Anyar dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan para aktor tertentu. Oleh karena itu, maka dapat dijelaskan bahwa konstruksi terhadap bahasa Jawa Anyar inilah yang telah menyebabkan terjadinya politik bahasa Jawa Anyar.

Apabila bahasa Jawa Anyar terus dibentuk oleh masyarakat sebagai bahasa adiluhung, kemudian berakibat terjadinya proses institusionalisasi dalam masyarakat melalui berbagai cara, maka hal ini menunjukkan bahwa bahasa Jawa Anyar dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Terkait penelitian ini, maka yang dapat dilihat adalah bahwa bahasa Jawa Anyar terus dikonstruksikan dengan tujuan untuk menciptakan satu sistem bahasa baru melalui institusi pendidikan sehingga mengakibatkan terjadinya homogenisasi bahasa Jawa.

Selaras dengan penjelasan di atas, adanya homogenisasi bahasa Jawa tersebut telah menyebabkan terjadinya pengukuhan terhadap bahasa Jawa Anyar sebagai bentuk politik bahasa. Dengan demikian, konstruksi terhadap bahasa Jawa Anyar merupakan pintu masuk bagi terciptanya politik bahasa Jawa Anyar. Dengan kata lain, bahasa Jawa Anyar dibentuk terlebih dahulu oleh aktor-aktor tertentu kemudian tahap berikutnya timbul pengakuan dari masyarakat dan berujung pada penciptaan satu sistem bahasa baru melalui institusi pendidikan. Proses penciptaan sistem bahasa baru tersebut mudah dilakukan karena keadiluhungan bahasa Jawa Anyar tersebut sudah diakui oleh masyarakat. Hal ini tentu saja berbeda apabila suatu bahasa tersebut tidak diakui oleh masyarakat sebagai bahasa yang baik dan layak untuk dijadikan kebijakan, maka akan sulit untuk dilakukan homogenisasi bahasa. Inilah gambaran mengenai betapa pentingnya sebuah konstruksi dilakukan terhadap suatu bahasa sebelum bahasa tersebut diimplementasikan ke dalam suatu kebijakan.

Berbagai penjelasan diatas, intinya menjelaskan bahwa ada kaitan antara konstruksi bahasa Jawa Anyar dengan terjadinya politik bahasa Jawa Anyar. Hal ini disebabkan, politik bahasa Jawa Anyar tersebut berjalan dengan baik, karena adanya proses konstruksi terlebih dahulu. Proses konstruksi inilah yang memberikan peluang terhadap terjadinya politik bahasa Jawa Anyar. Hal ini terbukti dengan adanya konstruksi terhadap bahasa Jawa Anyar dari zaman dinasti Mataram hingga saat ini maka tercipta suatu kebijakan terhadap bahasa Jawa Anyar melalui kurikulum pendidikan muatan lokal. Kebijakan politik Bahasa Jawa Anyar sebenarnya merupakan bentuk proteksi secara mekanik yang bersifat

birokratik, teknik organisasi, dan teknik struktural. Dari beberapa proteksi yang dilakukan tersebut, ternyata dalam lingkup kebijakan nasional pun bahasa Jawa Anyar diproteksi oleh pemerintah pusat. Hal ini terbukti dengan adanya ketetapan dalam UUD 1945 sebelum amandemen, pasal 32 berbunyi pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Setelah amandemen, pasal ini menjadi 2 ayat masing-masing menjelaskan: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan terkait pengukuhan bahasa Jawa Anyar, UUD 1945 mengamanatkan bahasa (daerah) Jawa harus dihormati dan dipelihara oleh negara termasuk pemerintah pusat atau pun daerah (Hasan Alwi dalam Riyadi, 1996).

Selain itu, adanya peneguhan atau pengukuhan sumbangan budaya, termasuk di dalamnya bahasa dan sastra Jawa melalui produk hukum tersebut, jelas menegaskan bahwa kekuatan hegemoni bahasa Jawa terhadap bahasa daerah lainnya sangat besar. Bahkan Suryohadiprodo (dalam Suryohadiprodo, 1995. h. 230), menjelaskan bahwa Budaya Jawa sebagai salah satu budaya besar, atau bahkan yang terbesar di Indonesia, tentu mempunyai hak dan peluang yang besar untuk mewarnai kebudayaan nasional. Alasan inilah kemudian yang juga dipertimbangkan pemerintah guna mengukuhkan bahasa Jawa Anyar. Berdasarkan penjelasan di atas, satu hal yang ingin penulis jelaskan berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah terkait proteksi bahasa Jawa Anyar yakni terkait peran para *founding father* dalam membesarkan bahasa Jawa Anyar hingga tercipta produk perundang-undangan guna memproteksinya.

Kita ketahui bersama bahwa Soekarno dan Soeharto adalah sosok pemimpin yang berasal dari Jawa. Dimana pada masa pemerintahannya kedua aktor tersebut pernah menggunakan bahasa Jawa sebagai alat politik mereka guna mendapatkan legitimasi. Simbol-simbol kejawaan sering mereka perlihatkan kepada publik sebagai bentuk penegasan identitas kejawaannya. Selain itu, karena mereka berasal dari bahasa dan kebudayaan Jawa maka bisa juga dilihat disini suatu warna *ethno-nationalism* Jawa dan juga penyebaran kebudayaan Jawa. Bahasa berjalan seiring dengan suatu perkembangan kapital yang diterjemahkan dalam bidang birokrasi dan kebudayaan birokrasi sipil dan militer. *Jawanisasi* berjalan seiring dengan birokratisasi dan militerisasi. Petunjuk untuk itu dengan mudah bisa dilacak dalam bahasa. Sesuatu yang dengan mudah didengar, terutama pada masa orde baru.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka wajar apabila dari dulu hingga saat ini bahasa Jawa Anyar menjadi bahasa daerah yang berpengaruh dan paling besar di Indonesia. Kekuatan negara dalam *mengcover* bahasa Jawa mampu melanggengkan kekuasaan dominasi bahasa Jawa Anyar melalui teks-teks bahasa Jawa Anyar. Selain kebijakan negara dalam bentuk UUD 1945, proteksi terhadap

bahasa Jawa Anyar juga dilakukan melalui proteksi mekanik dan organik. Proteksi secara mekanik dilakukan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dimana dalam hal ini para aparatus negara ditingkat pemerintahan lokal membuat suatu kebijakan guna mengukuhkan bahasa Jawa Anyar sekaligus sebagai upaya pelestariannya.

Misalnya saja pemerintah Jawa Tengah dan Jawa Timur membuat suatu kebijakan dalam bentuk Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan budaya Jawa, penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengenai pengembangan dan pembinaan bahasa, sastra, dan budaya Jawa, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tentang pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan budaya Jawa, serta pembentukan dewan bahasa Jawa di tingkat provinsi, kabupaten dan kota oleh pemerintah daerah terkait. (Hasil Konggres Bahasa Jawa V). Lahirnya berbagai kebijakan mengenai bahasa Jawa Anyar tersebut ternyata berimplikasi pada pelaksanaan operasional kebijakan tersebut.

Adapun pola operasional pelaksanaan kebijakan yakni melalui jalur formal seperti masuknya bahasa Jawa Anyar sebagai mata pelajaran di jenjang pendidikan usia dini (PAUD dan TK), pendidikan dasar (nSD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB), dan pendidikan menengah (SMA/MA /SMALB dan SMK). Sedangkan untuk jalur nonformal yakni melalui sanggar, paguyuban, padepokan, lembaga pendidikan keagamaan, keraton, dan kantong-kantong budaya Jawa, dan untuk jalur informal yakni dengan penggunaan bahasa Jawa Anyar dalam percakapan sehari-hari di dalam lingkungan keluarga.

Adapun terkait dengan penjelasan di atas, kita perhatikan kasus di Kota Surabaya dimana proteksi bahasa Jawa secara mekanik yakni dengan adanya keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/KPTS/013/2005 tentang kurikulum bahasa Jawa Anyar yang wajib dilaksanakan untuk jenjang SD dan SMP atau yang sederajat di seluruh wilayah Jawa Timur. Selain itu, ada ketentuan mengenai pemakaian bahasa Jawa satu hari penuh (*full day*) di sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat menengah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Hal tersebut merupakan manifestasi *good will* pemerintah Kota Surabaya pada era otonomi daerah dalam rangka mengartikulasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 melalui jalur pendidikan formal. Begitupun di wilayah Jawa Tengah proteksi mekanik terhadap bahasa Jawa dilakukan melalui adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 895.5/01/2005 tentang kurikulum bahasa Jawa yang wajib dilaksanakan untuk jenjang SD dan SMP atau yang sederajat di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa begitu kuatnya pengaruh kuasa bahasa Jawa Anyar hingga dilidungi negara dan pemerintah daerah. Apalagi kita ketahui bahwa bahasa ibu wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bukan bahasa Jawa Anyar. Namun, dengan adanya produk perundang-undangan dan proteksi mekanik

lainnya terhadap bahasa Jawa Anyar maka kedua propinsi tersebut harus menerapkan kebijakan penggunaan bahasa Jawa Anyar dan mengesampingkan bahasa ibu masing-masing daerah. Berdasarkan realita tersebut, maka terlihat ada semacam kekuasaan besar yang dimiliki bahasa Jawa Anyar hingga mampu menghegemoni. Apalagi dengan dukungan aparatus negara, maka pantas saja apabila bahasa Jawa Anyar terus mendominasi.

Point yang ingin penulis sampaikan dari penjelasan tersebut adalah bahwa bahasa Jawa Anyar yang dianggap adiluhung, telah bekerjasama dengan aparatus negara guna mempertahankan eksistensinya sebagai bahasa yang mendominasi. Oleh karena itu, kekuasaan vertikal yang dimiliki negara terhadap pemerintah daerah mampu menciptakan berbagai kebijakan yang memproteksi bahasa Jawa Anyar. Dalam hal ini, tentu saja tidak memberikan peluang kepada masing-masing daerah lainnya di Jawa Tengah untuk mengembangkan bahasa daerahnya masing-masing. Padahal sudah ada kebijakan otonomi daerah, dimana setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengembangkan budaya lokalnya termasuk bahasa daerahnya. Dengan kata lain, bahasa lokal memiliki potensi hidup dalam masyarakat walaupun kurang mendapat perhatian atau bahkan “dipinggirkan” oleh pemerintah melalui kebijakan bahasa Jawa Anyar yang telah mengesampingkan bahasa dan budaya daerah. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memproteksi bahasa Jawa Anyar tersebut, maka hal ini mengindikasikan bahwa bahasa Jawa lainnya tidak diberikan ruang sepenuhnya untuk berekspresi memberi makna dalam kehidupan sosialnya.

B. Resistensi Pasif Kepala Dinas Pendidikan Banyumas

Resistensi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan, berbentuk resistensi pasif. Resistensi pasif yang penulis maksud dalam penelitian ini yakni suatu bentuk tindakan yang menentang kekuasaan dominan, yang ditujukan untuk mencapai nilai-nilai tertentu, dan dilakukan dengan penuh kesadaran guna membebaskan diri dari kuasa budaya dominan sekaligus sebagai bentuk penegasan identitas bahwa mereka adalah bagian dari suatu keanggotaan. Merujuk pada penjelasan di atas, maka dalam hal ini resistensi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Banyumas yakni dengan cara menginstruksikan kepada seluruh sekolah di Banyumas untuk mengajarkan Bahasa Banyumasan di masing-masing sekolah dengan mengacu kepada kurikulum yang telah ditentukan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal.

Adapun ketentuan yang diinstruksikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah terkait kewajiban untuk mengajarkan Bahasa Jawa Anyar, itu hanya dijadikan sebagai acuan saja. Namun dalam hal ini tetap yang diprioritaskan untuk dipelajari adalah Bahasa Banyumasan. (Hasil wawancara dengan Bapak Edy Santoso, Kepala Dinas Pendidikan Banyumas). Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk resistensi pasif ini menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Banyumas patuh

terhadap kebijakan kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa Anyar di setiap jenjang pendidikan di Banyumas, seperti apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, tindakan tersebut semata-mata dilakukan untuk mengakomodasi keinginan Pemerintah Propinsi saja, sehingga dengan hal itu guru-guru di Banyumas bisa tetap mengajarkan muatan lokal Bahasa Banyumasan.

C. Resistensi Pasif Kepala Sekolah

Kepala sekolah, sebagai pimpinan tertinggi di sekolah pun memberikan respon terhadap adanya politik bahasa Jawa Anyar. Dari kedua belas informan kepala sekolah, pada dasarnya argumen mereka sama yakni menolak adanya politik Bahasa Jawa Anyar dalam kurikulum muatan lokal di setiap jenjang pendidikan di Banyumas. Kepala sekolah merespon politik Bahasa Jawa Anyar dengan cara melakukan resistensi pasif. Adapun resistensi pasif yang dilakukan kepala sekolah yakni dengan cara membuat kebijakan sekolah yang mewajibkan guru-guru muatan lokal disekolahnya untuk mengajarkan bahasa Banyumasan bersamaan dengan mengacu kepada kurikulum muatan lokal bahasa Jawa Anyar. Kebijakan sekolah ini tentu saja berdasarkan instruksi Dinas Pendidikan Banyumas. Selain itu, kepala sekolah juga menginstruksikan kepada guru muatan lokal untuk menggunakan Majalah Ancas sebagai bahan ajar bahasa Banyumasan selain LKS.

Bentuk perlawanan pasif ini dilakukan oleh kepala sekolah karena mereka menyadari kuatnya kekuasaan aparatus negara, sehingga satu sisi mereka harus melaksanakan kebijakan politik bahasa tersebut, namun disisi lain mereka melakukan perlawanan dengan cara menginstruksikan untuk mengajarkan bahasa Banyumasan di sekolah tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan Jawa Tengah.

D. Resistensi Pasif Guru Muatan Lokal

Guru muatan lokal bahasa Jawa di Banyumas, terdiri dari guru mulok yang berasal dari Banyumas dan di luar Banyumas seperti berasal dari daerah Yogyakarta dan Solo seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Guru muatan lokal melakukan resistensi pasif. Adapun resistensi pasif yang dilakukan oleh para guru muatan lokal di Banyumas yakni dilakukan dengan cara mengajarkan muatan lokal dengan bahasa Banyumasan meskipun instruksi dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah harus mengajarkan Bahasa Jawa Anyar. Para guru mulok tingkat SMP dan SMA mengajar muatan lokal sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Banyumas, yakni harus memprioritaskan Bahasa Banyumasan dalam mengajarkan mata pelajaran muatan lokal. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan LKS dan majalah Ancas sebagai buku pegangannya.

Berbeda dengan guru mulok SMP dan SMA, guru mulok pada jenjang Sekolah Dasar (SD) belum bisa mengajarkan bahasa Banyumasan pada mata

pelajaran muatan lokalnya sesuai dengan kurikulum muatan lokal Bahasa Banyumasan. Hal ini dikarenakan, Musyawarah Guru Muatan Lokalnya tidak berjalan efektif sehingga belum ada kurikulum muatan lokal bahasa Banyumasan yang dibuat. Merujuk pada perihal tersebut maka pelajaran muatan lokal pada tingkat SD masih mengacu kepada kurikulum yang ditentukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan guru muatan lokal di tingkat SD pasrah begitu saja. Ada upaya yang mereka lakukan terkait dengan hal tersebut, yakni para guru muatan lokal di tingkat SD tetap mengajarkan Bahasa Banyumasan meskipun tanpa panduan dari kurikulum muatan lokal Bahasa Banyumasan. Selain itu, meskipun bahan ajarnya mengacu kepada bahan ajar dari propinsi, namun mereka tetap bisa mengajarkan Bahasa Banyumasan dan kebudayaan Banyumas lainnya dengan mengacu pada majalah Ancas. Sedangkan perihal respon guru muatan lokal yang bukan asli Banyumas, apakah responnya sama dengan guru mulok asli orang Banyumas? Ternyata guru muatan lokal yang bukan asli Banyumas pun melakukan resistensi pasif terhadap politik bahasa Jawa Anyar.

E. Resistensi Tertutup Siswa di Banyumas

Sebagai objek dari pelaksanaan politik bahasa, para siswa tentu tidak diam saja. Meskipun mereka tidak terlalu menyadari efek panjang dari adanya politik bahasa, karena keterbatasan pengetahuan mereka terkait hal tersebut namun setidaknya mereka sama saja merespon politik Bahasa Jawa Anyar dengan melakukan resistensi tertutup.

Resistensi tersebut dilakukan karena pada dasarnya mereka tidak nyaman dengan dipelajarinya bahasa Jawa Anyar di sekolahnya. Ketidaknyamanan tersebut disebabkan karena mereka merasa bahwa bahasa Jawa Anyar bukan bahasa sehari-hari mereka, sehingga mereka mengalami kesulitan. Kesulitan yang mereka alami dalam mempelajari bahasa Jawa Anyar tersebut telah menyebabkan siswa melakukan resistensi tertutup. Resistensi tertutup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah resistensi (simbolis/ideologi) seperti penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.

Terkait pengertian di atas, maka resistensi tertutup yang dilakukan siswa di Banyumas yakni berbentuk penolakan siswa-siswa di Banyumas untuk mengaplikasikan Bahasa Jawa Anyar dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hanya menganggap bahasa Jawa Anyar hanya sebuah mata pelajaran saja yang cukup diketahui tanpa harus diaplikasikan dalam percakapan sehari-hari. Bentuk resistensi yang muncul dari para siswa di Banyumas tersebut memang tidak berpretensi mengubah sistem dominasi Bahasa Jawa Anyar, akan tetapi hanya untuk menolak kebijakan politik Bahasa Jawa Anyar dalam kurikulum muatan lokal di Banyumas.

F. Resistensi Radikal Budayawan Banyumas

Salah satu budayawan Banyumas yang begitu gencar memperjuangkan bahasa Banyumasan adalah Bapak Ahmad Tohari. Perjuangan budayawan Banyumas ini dalam mempertahankan eksistensi bahasa Banyumasan dilakukan dengan cara melakukan resistensi radikal. Menyoal perihal politik bahasa Jawa Anyar, maka proses resistensi yang dilakukan Ahmad Tohari terkait adanya politik bahasa Jawa Anyar yakni diawali dengan pembuatan Majalah Ancas yaitu majalah berbahasa Banyumas yang dijadikan buku pegangan bagi guru-guru muatan lokal di Banyumas dalam mengajarkan bahasa Banyumasan.

Majalah Ancas ini memang tidak lengkap seperti buku ajar Bahasa Jawa Anyar, namun setidaknya ada kosakata-kosakata dan tata bahasa Banyumasan ditampilkan dalam majalah tersebut. Ini tentu saja, menjadi layak untuk dijadikan bahan ajar oleh para guru muatan lokal di Banyumas. Selain itu, perihal kamus bahasa Banyumasan pun sudah disebar luaskan bukan hanya ke sekolah-sekolah, namun juga ke setiap instansi di Banyumas bahkan ke perusahaan media elektronik sebagai acuan bagi para wartawan untuk menulis berita yang bertajuk bahasa Banyumasan.

PENUTUP

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka sampailah pada bagian akhir tulisan ini. Ada beberapa catatan akhir yang akan penulis tuangkan sebagai kesimpulan, dan beberapa saran guna menjadi bahan kajian bersama. Pada bagian kesimpulan ini, penulis akan menyimpulkan dua hal yakni dari segi temuan lapangan, dan dari segi teori yang menghasilkan refleksi teoritis.

Pertama, politik bahasa Jawa Anyar dalam kurikulum muatan lokal di Banyumas, lahir karena adanya proses konstruksi dan rekonstruksi terhadap bahasa Jawa Anyar. Bahasa Jawa Anyar yang dikonstruksi sebagai bahasa adiluhung pada era sebelum reformasi dan direkonstruksi pada era reformasi sebagai satu-satunya bahasa yang mempunyai ilmu linguistik telah menyebabkan bahasa Jawa Anyar mempunyai kekuasaan besar untuk mendominasi bahasa Jawa lainnya termasuk mendominasi bahasa Banyumasan.

Kedua, terjadinya politik bahasa Jawa Anyar mencerminkan adanya kepentingan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah guna memberikan *image* baik terhadap masyarakat Jawa Tengah, sehingga Jawa Tengah menjadi propinsi yang masyarakatnya dipandang memiliki budi pekerti luhur. Terkait dengan hal itu maka tentu saja ini menegaskan bahwa politik bahasa Jawa Anyar, benar-benar telah mengakomodasi berbagai kepentingan para apaturatus negara. Sehingga mereka memproteksi bahasa Jawa Anyar.

Ketiga, dengan adanya politik bahasa Jawa anyar dalam kurikulum muatan lokal tersebut maka masyarakat Banyumas merespon politik bahasa Jawa Anyar dengan cara melakukan resistensi. Adapun bentuk konkret resistensi masyarakat

Banyumas dapat terlihat dari respon beberapa aktor berikut ini. (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menginstruksikan kepada seluruh guru muatan lokal di Banyumas untuk mengajarkan muatan lokal Bahasa Banyumasan dengan mengacu kepada kurikulum muatan lokal Bahasa Banyumasan dan diharuskan menggunakan LKS dan Majalah Ancas sebagai bahan ajar. (2) Kepala sekolah membuat kebijakan sekolah mengenai penyisipan mata pelajaran bahasa Banyumasan ke dalam mata pelajaran bahasa Jawa Anyar. (3) Guru muatan lokal diharuskan membuat strategi pembelajaran yang akan mendukung pembelajaran bahasa Banyumasan. (4) Siswa di Banyumas tidak mau mengaplikasikan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari di lingkungan mereka sekalipun mereka berbicara kepada orang yang lebih tua. (5) Budayawan Banyumas membuat kamus bahasa Banyumasan dan Majalah Ancas yang disebarkan ke seluruh sekolah di Banyumas sebagai bahan ajar guru muatan lokal.

Keempat, berbagai bentuk respon yang dilakukan masyarakat Banyumas tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya mereka melakukan resistensi terhadap politik bahasa Jawa Anyar. Resistensi yang dilakukan masyarakat Banyumas terhadap politik bahasa Jawa Anyar tersebut dapat dilihat sebagai bentuk resistensi pasif, tertutup, dan radikal. Dengan demikian, adanya kebijakan negara yang masuk dalam ranah institusi formal (sekolah) dan dipaksakan melalui cara politik sehari-hari tersebut, telah direspon oleh masyarakat Banyumas dengan melakukan resistensi. Resistensi ini-lah kemudian yang diharapkan masyarakat Banyumas untuk dapat keluar dari dominasi bahasa Jawa Anyar.

Realitas sebagaimana yang diungkapkan di muka, membawa kita pada refleksi bahwasanya pada saat ini menteorisasi “politik bahasa” sebagai suatu perencanaan bahasa yang disengaja untuk menciptakan satu sistem bahasa baru guna menghasilkan suatu masyarakat terbaik tidak lagi mampu menjelaskan kompleksitas masyarakat Jawa Tengah saat ini. Penjelasan teori tersebut apabila dikorelasikan dengan hasil penelitian di lapangan, ternyata tidak berbanding lurus. Hal ini mengindikasikan bahwasanya berdasarkan penelitian di lapangan politik bahasa itu hanya merupakan pengurangan partisipasi & representasi kelompok bahasa minoritas saja.

Konsep masyarakat terbaik akibat adanya penerapan politik bahasa seperti yg dikemukakan dalam teori politik bahasa menurut Fernandez tidak berlaku di Banyumas. Hal ini dikarenakan, dengan adanya politik bahasa Jawa Anyar dalam kurikulum muatan lokal, menimbulkan resistensi dari warga sekolah. Resistensi ini-lah yang menegaskan bahwa konsep masyarakat terbaik tidak terealisasi. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwasanya politik bahasa itu tidak selamanya memberikan pengaruh positif terhadap objek sasarannya. Begitu pun politik bahasa Jawa Anyar tidak selamanya memberikan pengaruh positif bagi warga sekolah. Hal ini dikarenakan, dengan adanya kebijakan politik bahasa Jawa Anyar, telah menyebabkan minimnya ruang bagi bahasa minoritas untuk berekspresi dan menunjukkan identitasnya. Dengan adanya alasan tersebut maka

penulis sangat mengapresiasi terhadap tindakan yang dilakukan warga sekolah sebagai bentuk resistensi mereka terhadap politik bahasa Jawa Anyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, Alfathri (ed). (2006). *Resistensi Gaya hidup: Teori dan Realitas*. Yogyakarta, Jalasutra
- I. ALWASILAH, CHAEDAR. (1997). *POLITIK BAHASA DAN PENDIDIKAN*. JAKARTA, REMAJA ROSDAKARYA
- Anwar, Wan. *Kuntowijoyo: karya dan dunianya*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, dan Hellen Tiffin. (1998). *Key Concept in Postcolonial Studies*. London and New York: Routledge
- Ashcroft, Bill. (2001). *On Post-Colonial Futures: Transformations of Colonial Culture*. Trowbridge, Cromwell Press.
- Azwar. (1997). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Liberty
- Bhabha, Homi K. (2006). *The Location Culture*. London and New York: Routledge Classics
- Bluth, B.J. (1982). *Parson's General Theory of Action: A Summary of the Basic Theory*. Granada Hills, California.
- Budiarto, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik* Ed. Revisi. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiman, Hikmat (ed). (2005). *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta, The Interseksi Foundation.
- Budiman, Hikmat. (2002). *Lubang Hitam Kebudayaan*. Yogyakarta, Kanisius
- Budiwati, E. (2000). *Islam Sasak, Wetu Telu versus Waktu Lima*, Yogyakarta, LKiS
- Dhakidae, Daniel. (2003) *Cendekiawan dan kekuasaan dalam Negara orde baru*. pt gramedia pustaka utama, Jakarta
- Djausal, Anshori. (2002). *Komunitas Gelembung Sabun: Menyelamatkan Generasi dari Antiklimaks Perubahan*. Yogyakarta, Media Pressindo
- E. J. Hobsbawm. (1990). *Nations and Nationalism Since: Programme, Myth, Reality*. UK. Cambridge university press
- Endraswara, Suwardi. Dkk. (2008). *Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Jawa*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Propinsi DIY
- Faith, Karlene. (1998). *Resistance: Lesson From Foucault and Feminism dalam Stand and Radke*, dalam John Storey, 1998. *Culture Theory and Popular Culture*. Georgia: Georgia Press.
- Fanon, Frantz. (2000). *Bumi Berantakan, Buku Pegangan Untuk Revolusi Hitam yang Mengubah Wajah Dunia*. (Penerjemah Ahmad Asnawi. Judul Asli *The Wretched of The Earth* diterbitkan oleh Grove Press di New York). Jakarta, Teplok Press
- Faruk, dkk. (2000). *Perlawanan atas Diskriminasi Rasial-Etnik, Konteks Sosial-Ideologis Kritis Sastra Peranakan Tionghoa*. Magelang, Yayasan Indonesia Tera
- Fashri, Fauzi. (2007). *Penyingkapan Kuasa Simbol Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta, Juxtapose.

- Foucault, Michel. (1985). *The History Of Sexuality: The Use Of Pleasure*. New York, Penguin Books.
- Gilbert, Helen dan Jacqueline Lo. (1998). "Poscoloniality and The Question Of Modern Indonesia Literature". An International Research Workshop, The Rex Cramphorn Studio Center for Performance Studies University Of Sidney, Maret, 29-31
- Gurr, Ted Robert. (2002). Defrivasi Relatif dan Kekerasan dalam Thomas Santoso, Teori-teori Kekerasan. Ghalia Indonesia bekerjasama Universitas Kristen Petra, Jakarta.
- II. HALIM, AMRAN. DKK. (1983). *PAPERS FROM THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUSTRONESIAN LINGUISTICS*. AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY, DEPT. OF LINGUISTICS, RESEARCH SCHOOL OF PACIFIC STUDIES
- Haryatmoko, *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa*, Majalah Basis nomor 11-12 tahun ke-52, November-Desember (2003)
- Hasil Keputusan Konggres Basa Jawi V Tahun 2011
- Herper, Charles L. (1989). *Exploring social Chang*. Prentice Hall Inc, New Jersey
- III. HERYANTO ARIEL. (1996). *IDEOLOGY GENDER DAN KEMISKINAN*. YOGYAKARTA, KANISIUS
- Hettne, Bjorn. (2001). *Teori Pembangunan dan Dunia Ketiga*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Hikam, Perlawanan Sosial: Telaah Teoritis dan Beberapa Studi Kasus. Dalam Prisma, No. 8 Tahun XIX, (1990)
- Jenkins, Richard. (2004). *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Jim Supangkat, Rizki Akhmad Zaelani, *Ikatan Silang Budaya Seni Serat Biranul Anas*. Art fabiks (2006)
- Khotimah, Siti Khusnul. (2010). *Konsumsi Media Lokal dan Konstruksi Identitas Kultural 'Wong Ngapak' (Studi Penggunaan Program "curanmor" pada Tiga Mahasiswa Cilacap di Yogyakarta)*. Thesis: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Kridalaksana, Harimurti, dkk. (2001). *Wiwara: Pengantar Bahasa dan Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Lombard, Denys. (2000). *Nusa Jawa: Silang Budaya Part 3 Tentang Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Moedjanto. (1987). *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Raja-raja Jawa*. Yogyakarta: Kanisius
- Mufid, Ahmad Syafi'i. (2006). *Tangklukan Abangan dan Tarekat Kebangkitan Agama di Jawa*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Newman, W. Lawrence. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn & Bacon, Needham Heights
- Nugroho, Ganjar. (2001). *Resistensi Wong Cilik Atas Pasar (Alokasi-Konsumsi)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5, Nomor 1, Juli 2001 (91-119)
- Nugroho, Mohammad. (2003). *Kebijakan Publik dan Resistensi Masyarakat: Analisa Krisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata*. Malik Ibrahim, Tesis, Konsentrasi

- Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Retnowati, Ratih. (2004). *Resistensi Perempuan dalam Institusi Kawin Mut'ah*. RENAI: Jurnal Politik Lokal dan Sosial, Tahun IV No. 1 Edisi Musim Hujan November 2003-Maret 2004.
- Ritohardoyo, Su. (2003). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah dalam Bahan Ajar Mata Kuliah Pengantar Perencanaan Pembangunan Wilayah, Program Studi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM*, Yogyakarta.
- Riyadi, [Slamet](#). (1996). *Ha-na-ca-ra-ka: Kelahiran, Penyusunan, Fungsi, dan Makna*. Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusantara bekerja sama dengan Balai Penelitian Bahasa
- Rocha, Antonio L Casado da. (2002), *Pembangkit Sipil*, Cetakan Pertama, Tadarus.
- Rusdiarti, Suma Riella. *Bahasa, Pertarungan Simbol dan Kekuasaan*. Majalah Basis nomor 11-12 tahun ke-52, November-Desember 2003
- Sachari, Agus. (2007). *Budaya Visual Indonesia*. Jakarta, Erlangga
- Saptari, ratna dan holzner, brigitte. (2007). *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta, Kalyanamitra
- Scionti, [Theresa Louise](#). (2001). *Language, Politics and the Halpulaar'en of Mauritania*. University of Arizona
- Scott, James. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Selosoemardjan. (1962). *Social changes in Jogjakarta*. By Published Under The Auspices of the Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University Press
- [Storey](#), John. (1998). *Cultural Theory and Popular Culture: A Reader*. Prentice Hal
- Subkhan, Imam. (2007). *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Di Yogya: City Of Tolerance*. Yogyakarta: Kanisius
- Suryohadiprojo, [Sayidiman](#). (1995). *Membangun Peradaban Indonesia*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- IV. SUSANTO, BUDI. (2008). *MEMBACA POSTKOLONIALIS DI INDONESIA*. YOGYAKARTA: KANISIUS
- [Suyanto](#), (1993). *Hubungan Pola-Pola Klasik Jawa Terhadap Produk Kerajinan Tembaga dan Kuningan Tumang, Cepogo, Boyolali*. Laporan Penelitian Kelompok Sekolah Tinggi Seni Indonesia.
- V. SYAFII MUFID, AHMAD. (2000). *TANGKLUKAN, ABANGAN, DAN TAREKAT: KEBANGKITAN AGAMA DI JAWA*, JAKARTA, YAYASAN OBOR INDONESIA.
- Tugiman, Hiro. (1999). *Budaya Jawa & Mundurnya Presiden Soeharto*. Yogyakarta: Kanisius
- Widayanti, [Titik](#). (2009). *Politik Subaltern: Pergulatan Identitas Waria*. Yogyakarta, Research Center for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada
